

DEPUTI BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon I : Deputi Bidang Perundang-undangan
Tahun : 2014

| | | | |
|---|----|---|------|
| Terselenggaranya izin prakarsa, dan analisa RUU, RPerpu, RPP, penyiapan pertimbangan Rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan administrasi permasalahan hukum, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, prerogatif, naturalisasi, dan perundang-undangan. | 1. | Persentase penyelesaian hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, dan pertimbangan RPerpres sesuai dengan standar. | 100% |
| | 2. | Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar. | 100% |
| | 3. | Persentase penyelesaian hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan UU, Perpu, dan PP sesuai dengan standar. | 100% |
| | 4. | Persentase penyelesaian analisis dan penyusunan pendapat hukum atas gugatan dan permohonan hak uji materiil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar. | 100% |
| | 5. | Persentase penyelesaian analisis atas permohonan dan permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, serta naturalisasi sesuai dengan standar. | 100% |

Jakarta, 11 Maret 2013
Deputi Bidang Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti


RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Unit Organisasi Eselon II : ASISTEN DEPUTI PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN

Tahun Anggaran : 2014

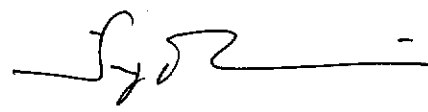
| Sasaran Strategis (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|---|---|---------------|
| Tersedianya analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, pertimbangan Perpres serta ijin prakarsa penyusunan RUU diluar Prolegnas, dan evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, dan PP bidang ekonomi, keuangan, dan industri | 1. Persentase penyelesaian hasil analisis RUU, RPerpu, RPP dan pertimbangan RPerpres di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sesuai dengan standar | 100% |
| | 2. Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar | 100% |
| | 3. Persentase penyelesaian penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, Perpu, dan PP di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sesuai dengan standar | 100% |
| | 4. Persentase penyelesaian hasil evaluasi atas pelaksanaan UU, Perpu, dan PP di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sesuai dengan standar | 100% |

Deputi Bidang Perundang-undangan,



(Muhammad Sapta Murti)

Jakarta,
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



(Lydia Silvanna Djaman)

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
ASISTEN DEPUTI PUU BIDANG POLITIK DAN KESRA**

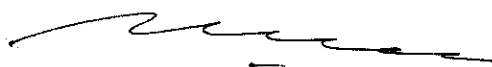
Unit Eselon II : Asisten Deputi PUU Bidang Politik dan Kesra
Tahun : 2014

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| Terselenggaranya izin prakarsa, dan analisa RUU, R Perpu, RPP, penyiapan pertimbangan RPerpres, Otentifikasi UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis perundang-undangan bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum dan HAM, aparatur negara, serta kesejahteraan rakyat | 1 Persentase penyelesaian hasil analisis RUU, RPerpu, RPP dan pertimbangan RPerpres di bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan standar | 100% |
| | 2 Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP di bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar | 100% |
| | 3 Persentase penyelesaian hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah di bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan standar | 100% |

Menyetujui,
Deputi Bidang Perundang-undangan


Muhammad Sapta Murti

Jakarta, Maret 2013
Asisten Deputi PUU Bidang Politik dan Kesra


Wisnu Setiawan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon II
Tahun

: Asisten Deputi Hukum
: 2014

| | | | |
|--|----|---|------|
| Terselenggaranya pelaksanaan penelitian, analisis dan penyusunan pendapat hukum di bidang litigasi dan permasalahan hukum, perjanjian internasional, ekstradisi, prerogatif dan naturalisasi, serta pengadministrasian peraturan perundang-undangan. | 1. | Persentase penyelesaian analisis dan penyusunan pendapat hukum atas gugatan dan permohonan Hak Uji Materiil sesuai dengan peraturan dan standar. | 100% |
| | 2. | Persentase penyelesaian analisis dan penyusunan pendapat hukum atas bantuan hukum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan standar. | 100% |
| | 3. | Persentase penyelesaian analisis RUU pengesahan perjanjian internasional, dan penyelesaian permohonan yang meliputi izin prakarsa, Surat Presiden (Ampres), pertimbangan RPerpres, permohonan ekstradisi, serta penyelesaian penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan dalam perjanjian internasional, sesuai dengan peraturan dan standar. | 100% |
| | 4. | Persentase penyelesaian analisis atas permohonan dan permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, serta naturalisasi sesuai dengan peraturan dan standar. | 100% |
| | 5. | Persentase UU, Perpu, PP yang didistribusikan, dipublikasikan, dan didokumentasikan sesuai dengan standar. | 100% |

Deputi Bidang Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti

Jakarta, 11 Maret 2013
Asisten Deputi Hukum,



Surtpto